



# Implementasi Nilai-nilai Multikulturalisme di STKIP Yapis Dompu

Ilyas<sup>1</sup>, Jamaah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Pendidikan Sejarah, STKIP Yapis Dompu, NTB, Indonesia

E-mail: [ilyascendekia@gmail.com](mailto:ilyascendekia@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2022-08-11 Revised: 2022-09-22 Published: 2022-10-01  <b>Keywords:</b> <i>Analysis;</i> <i>Implementation;</i> <i>Multiculturalism Value.</i>	Educational institutions, from the lowest to higher education, which are tasked with engineering knowledge, skills, attitudes and values have an important role in forming a society that is tolerant and respectful of differences. This study analyzes the implementation of multiculturalism values in learning practices at STKIP Yapis Dompu. This qualitative research data collection used interview techniques and data analysis was carried out descriptively. This study shows that the application of multiculturalism values in the STKIP Yapis campus environment, especially in relation to the minority of non-Muslim students, is quite good. Although symbolically, the appearance of the female students, especially the female students, is quite prominent and exclusive because they are not veiled in the midst of other female friends who are not dressed in Muslim clothing, but they feel comfortable both inside and outside the classroom. This is because in the classroom, the learning process carried out by lecturers (Islamic religion) still strives to maintain the spirit of mutual respect, especially when it comes to lecture materials that discuss differences in the doctrines of each religion. Meanwhile, outside the classroom, minority students also get a safe social environment and support from extra-campus organization activist friends. The Indonesian Islamic Student Movement Organization (PMII), one of the wing organizations of Nahdlatul Ulama, has even volunteered to accept the membership of non-Muslim students.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2022-08-11 Direvisi: 2022-09-22 Dipublikasi: 2022-10-01  <b>Kata kunci:</b> <i>Analisis;</i> <i>Implementasi;</i> <i>Nilai Multikulturalisme.</i>	Lembaga pendidikan, sejak dari terendah hingga pendidikan tinggi, yang bertugas melakukan rekayasa pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang toleran dan saling menghargai perbedaan. Penelitian ini menganalisis implementasi nilai-nilai multikulturalisme dalam praktik pembelajaran di STKIP Yapis Dompu. Pengumpulan data penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara dan analisis data dilakukan secara deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai multikulturalisme di lingkungan kampus STKIP Yapis, terutama dalam relasi dengan minoritas mahasiswa nonmuslim, cukup baik. Meski secara simbolik penampilan terutama mahasiswa perempuan cukup menonjol dan eksklusif karena tidak berjilbab di tengah teman-teman perempuan lainnya yang tidak berbusana muslimah tersebut, namun mereka merasa nyaman baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Hal itu disebabkan di dalam kelas, proses pembelajaran yang dilakukan dosen (agama Islam) tetap berupaya menjaga semangat saling menghargai khususnya jika menyangkut materi kuliah yang membahas perbedaan doktrin agama masing-masing. Sedangkan di luar kelas, mahasiswa minoritas juga mendapatkan lingkungan pergaulan yang aman dan support dari teman aktivis organisasi ekstrakampus. Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), salah satu organisasi sayap Nahdlatul Ulama, bahkan menyediakan diri menerima keanggotaan mahasiswa non muslim.

## I. PENDAHULUAN

UNESCO (1972) menghendaki agar pembelajaran tidak sekadar melakukan transfer pengetahuan dan ketrampilan tapi juga peserta didik memiliki kesiapan hidup bersama dalam perbedaan. Belajar hidup bersama (*learning to life together*) adalah konsekuensi dari globalisasi ketika sekat-sekat geografis itu kini hampir hilang berkat kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi (Naisbitt dan Aburdene, 1992),

namun globalisasi juga potensial menimbulkan gesekan dan konflik termasuk terjadinya invasi berbagai ideologi transnasional yang mengakibatkan tergerusnya sikap toleransi, meski berada di bawah yayasan Islam namun di STKIP Yapis Dompu terdapat beberapa mahasiswa nonmuslim khususnya Hindu dan Kristen. Mahasiswa Hindu berasal dari warga transmigran Bali yang terdapat di beberapa kecamatan di Kabupaten Dompu seperti Kecamatan

Manggelewa, Kecamatan Kempo dan Kecamatan Pekat, sedangkan mahasiswa Kristen berasal dari pendatang atau perantau dari Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama Flores dan Sumba.

Kendati hingga kini di Dompu belum pernah terjadi peristiwa persekusi atau kekerasan berbasis agama terhadap minoritas secara massif, namun potensi pergesekan sosial khususnya dalam kehidupan beragama tetap berpeluang terjadi, khususnya relasi muslim dan Hindu, hal itu dipicu oleh pembangunan pura yang diklaim sebagai pura terbesar di Asia Tenggara yang terdapat di Desa Oibura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima, yang ditempati komunitas Hindu (Tantowi, 2017), meski secara administratif Kecamatan Tambora ini berada di bawah otoritas Kabupaten Bima, namun secara geografis wilayah di kaki Gunung Tambora ini--- karena faktor historis sebenarnya lebih dekat dengan Kabupaten Dompu. Kecamatan Pekat, Dompu, merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Tambora setiap muncul masalah sosial di wilayah terakhir ini akan berdampak secara langsung terhadap stabilitas politik di Dompu. Demikian juga protes sejumlah tokoh Islam, ormas dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bima terhadap beberapa isu krusial seperti keberadaan patung "Budha" di sebuah tempat wisata di Bima maupun perlombaan bola voli waria se Pulau Sumbawa di Kabupaten Bima, di lingkungan kampus-kampus di Dompu dan Bima sejauh ini perilaku intoleran juga belum pernah terjadi, tetapi langkah antisipatif dan preventif harus dilakukan. Pendidikan berbasis multikulturalisme adalah salah satu solusi yang dipilih pemerintah untuk mengurangi kecenderungan ideologisasi di atas, pemerintah juga menggalakkan pendidikan karakter maupun gerakan moderasi beragama, ketiganya dapat dikatakan berada dalam satu tarikan nafas yakni bagaimana menumbuhkan kembali semangat kebersamaan, gotong royong dan saling menghargai, menurut Abdullah dalam (Mahfud, 2011: 90) multikulturalisme adalah sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaraan budaya-budaya lokal dengan tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang ada, dalam multikulturalisme ditumbuhkan semangat untuk saling berbagi bersama.

Indonesia sebagai negara majemuk sangat relevan untuk mengembangkan model pembelajaran berdasarkan semangat multikulturalisme itu, kemajemukan dapat menjadi sumber kekuatan masyarakat tapi juga bisa menjadi

ancaman persatuan, masyarakat majemuk (*plural society*) sebagai identitas bangsa Indonesia meniscayakan suatu konsep persatuan di atas keberagaman, di sanalah konsep multikulturalisme diharapkan hadir, multikulturalisme berpijak pada pengakuan tentang keanekaragaman dari suatu masyarakat yang heterogen. Heterogenitas tersebut bisa dimaknai sebagai suatu keanekaragaman budaya, tradisi, gaya hidup, agama dan bentuk-bentuk perbedaan yang lainnya, lemahnya multikulturalisme di tengah kemajemukan masyarakat dapat memantik konflik yang sangat merugikan banyak pihak, konflik tersebut dapat distimulasi oleh isu politik, ekonomi, agama, dan sebagainya (Nugraha, dkk, 2020: 141-142). Menurut Taylor (dalam Nugraha, dkk, Jurnal Pendidikan PKN, 2020: 143), ide multikulturalisme adalah suatu ide untuk mengatur perbedaan dengan prinsip-prinsip pengakuan akan perbedaan itu sendiri. Ide ini menyangkut pengaturan relasi antar kelompok, eksistensi kelompok pendatang, masyarakat adat, dan lainnya, secara substantif multikulturalisme adalah kelapangan menerima kelompok lain secara sejajar sebagai kesatuan dalam perbedaan, tanpa menghiraukan perbedaan kultural, jenis kelamin, agama, atau pun bahasa, fokus multikulturalisme adalah pemahaman terhadap kehidupan yang kaya perbedaan kebudayaan secara personal maupun kolejal. Multikulturalisme mengandung dua sisi, secara ke luar mengandung nilai-nilai toleransi, pluralisme, demokrasi, menghargai kemajemukan sedangkan secara ke dalam multikulturalisme juga menghendaki agar peserta didik tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri (Muh Amin, 2018), sebagai agen perubahan sosial lembaga pendidikan seperti sekolah dan kampus memiliki peran strategis dalam melakukan rekayasa berpikir, perilaku dan sikap individu dan masyarakat termasuk dalam menyikapi perbedaan yang ada di tengah masyarakat.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti objek secara alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trainggulasi (gabungan), analisis data secara induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2008: 1). Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi

entitas-entitas kuantitatif (Mulyana, 2008: 150), tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidik, adapun sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini diantaranya referensi-referensi pustaka yang bersumber dari literatur terkait dengan multi-kulturalisme.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Berikut ini dipaparkan hasil penelitian yang berasal dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi mengenai penerapan nilai-nilai multikultural di kampus STKIP Yapis Dompus.

##### 1. Multikulturalisme dalam Praktik Pembelajaran

Toleransi dan saling menghargai menjadi landasan dalam interaksi segenap sivitas akademika STKIP Yapis Dompus baik sesama dosen, staf pegawai maupun mahasiswa, selain mendapatkan layanan administrasi yang sama seluruh mahasiswa juga memperoleh hak yang sama dalam kegiatan pembelajaran. Mereka diperlakukan sama tanpa memandang perbedaan status sosial maupun agama. Dalam matakuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) misalnya, semua mahasiswa non muslim tidak diwajibkan ikut memprogramkan matakuliah tersebut. Karena jumlah mahasiswa non muslim minoritas maka untuk keperluan penilaian dan ujian akhir semester maka kebijakan pihak kampus membolehkan mereka untuk belajar kepada tokoh agama masing-masing, misalnya pada mangku (bagi penganut agama Hindu) dan pendeta (bagi Katholik). Jumlah mereka yang sedikit juga tidak memenuhi syarat untuk membuka kelas khusus dan diajar oleh dosen sesuai agama yang dianut mahasiswa. Sebaliknya, pihak kampus bekerjasama dengan tokoh agama masing-masing untuk melakukan ujian kepada mahasiswa bersangkutan, biasanya pihak kampus akan berkomunikasi dan menyurati tokoh agama bersangkutan dan memintanya melakukan proses ujian dan penilaian terhadap penguasaan mahasiswa terhadap agamanya. Selanjutnya nilai yang diperoleh tersebut menjadi dasar bagi pihak kampus untuk mencantulkannya

dalam Kartu Hasil Studi (KHS) pada semester berjalan.

Dalam perkuliahan di kelas dosen pengampu matakuliah PAI memberikan kebebasan kepada mahasiswa non muslim untuk tidak mengikuti perkuliahan. Tapi di sisi lain dosen juga mengizinkan jika yang bersangkutan berminat mengikuti perkuliahan yang bukan agamanya. Dengan pertimbangan untuk saling memahami perbedaan agama masing-masing akhirnya mahasiswa non muslim memilih mengikuti perkuliahan. Tidak sekadar ikut secara pasif bahkan GAW, seorang penganut Hindu, ikut melakukan presentasi makalah bersama anggota kelompoknya yang muslim. Ia bahkan, karena satu-satunya anggota kelompok yang kebetulan memiliki laptop, ikut menyusun makalah dan melakukan *googling* di internet untuk mencari bahan-bahan presentasi dan membuat *slide*, jika ada bagian dalil (ayat atau hadis) yang tidak dipahaminya diserahkan kepada teman lainnya yang lebih memahami. Menurut dosen PAI Idhar, keberadaan satu mahasiswa non muslim dalam kelas membuatnya harus menyesuaikan bahan-bahan perkuliahan terutama yang bersentuhan langsung dengan doktrin agama yang sensitif. Misalnya berkaitan doktrin Islam tentang tauhid dan syirik yang secara dogmatik dianggap bertentangan dengan ajaran Hindu dan Kristen, dia menyampaikan penjelasannya sedemikian rupa sehingga tidak menyinggung keyakinan yang berbeda. Kesempatan presentasi tugas kuliah PAI juga digunakan oleh dosen untuk saling menjelaskan beberapa aspek dalam ajaran agama masing-masing baik tentang aspek ritual, tata cara peribadatan, hubungan sosial serta mengenai hal-hal yang boleh dan terlarang, hal tersebut cukup membantu saling pengertian satu dengan lainnya. Selain itu GAW juga secara seukarela ikut mengikuti kegiatan belajar membaca Al-Quran (mengaji) yang diperuntukkan bagi para mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP), kegiatan ini diselenggarakan di luar waktu kuliah (libur) selama 12 kali pertemuan.

Kesetaraan dan pengakuan adalah diantara nilai-nilai dasar multikulturalisme, kesetaraan dan pengakuan mengandaikan sikap dan perlakuan yang sama

terhadap orang lain atau kelompok lain yang berbeda. Pada akhirnya sikap tersebut memunculkan sikap adil, dalam praktik pendidikan setiap pendidik harus bersikap adil terhadap seluruh peserta didik, tidak hanya bersikap adil dan objektif dalam melakukan penilaian tapi juga dalam aspek lain seperti memberi perhatian, bimbingan, pengorganisasian kelas dan lainnya. Alih-alih mempertajam perbedaan, dalam pembelajaran di kelas dosen matakuliah agama di STKIP Yapis malah menjadikannya sebagai media dialog untuk mengurangi salah paham, secara teoretis upaya dosen tersebut biasa disebut sebagai pedagogi kesetaraan dimana pendidik memandang dan memperlakukan peserta didik secara setara.

## 2. Hubungan Sosial dan Personal

Prasangka dan saling curiga seringkali menjadi hambatan dalam membangun masyarakat multikultural, apalagi bagi masyarakat yang secara simbolik hidup dalam suasana kemajemukan yang menonjol seperti perbedaan agama, warna kulit, ras, suku dan lainnya, oleh karena itu menjalin interaksi secara personal dapat menjadi jawaban. Relasi-relasi sosial yang bersifat nonformal biasanya mampu mencairkan kebekuan dan kekakuan yang ada baik dalam aktivitas sosial, pertemuan di berbagai ruang publik (seperti olahraga, taman, rumah ibadah dan lainnya). Mencairnya prasangka berkat relasi personal semacam itu dirasakan oleh GAW, semula ia takut kuliah di kampus STKIP Yapis yang mayoritas mahasiswanya muslim. Apalagi tidak banyak teman Hindu seangkatannya yang kuliah, meski di SMA ia memiliki 15 teman Hindu, tapi nyaris tidak ada yang melanjutkan kuliah di daerah asal. Mereka umumnya memilih menikah, bekerja atau walaupun kuliah memilih kuliah di daerah lain yang karakteristik mahasiswanya lebih beragam bahkan memilih kuliah di kampus Hindu. Di semester awal GAW mengaku *insecure* (tidak nyaman) berada di tengah mayoritas teman kuliahnya yang muslim, secara simbolik penampilannya tampak mencolok di tengah mahasiswa perempuan yang semuanya memakai jilbab. Persepsinya mulai berubah sejak ia bergabung, tepatnya diajak bergabung oleh temannya, di organisasi Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII), sebuah orga-

nisasi sayap Nahdlatul Ulama (NU). Ia bergabung dengan organisasi tersebut di semester satu. Semula ia merasa asing berada di tengah pengurus dan peserta yang muslim, tetapi di tempat pengkaderan ia dimotivasi oleh mahasiswa non muslim lainnya yang pernah bergabung dengan organisasi tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan akhirnya ia bertahan. Hingga kini GAW masih aktif bahkan menjadi pengurus komisariat PMII di kampusnya periode 2021-2022, selain itu GAW juga menjadi pengurus BEM, menjadi anggota paduan suara di kampus, terlibat dalam kepanitiaan kampus maupun aktivitas kemahasiswaan lainnya sehingga ia menjadi semakin punya rasa percaya diri. Pada kasus GAW terlihat bahwa relasi personal dan sosial tidak hanya efektif dalam mengurangi prasangka tapi juga menumbuhkan sikap kognisi, yakni kesediaan untuk menerima pihak lain yang berbeda.

## B. Pembahasan

Secara umum kelompok minoritas dimanapun, karena menyandang identitas yang berbeda, seringkali merasa terancam (atau diancam) oleh kelompok mayoritas. Identitas-identitas tersebut dapat berupa perbedaan agama, keyakinan, suku, ras, warna kulit, afiliasi politik dan ideologi, orientasi seksual dan lainnya, namun dalam konteks pembelajaran maupun relasi sosial di STKIP Yapis Dompu perasaan terancam (*insecure*) dan tidak nyaman beberapa mahasiswa nonmuslim (Hindu dan Kristen) dapat direduksi karena implementasi nilai-nilai multikulturalisme, dalam konteks perkuliahan di kelas dosen pengampu matakuliah agama Islam khususnya menerapkan pedagogi kesetaraan yakni memperlakukan semua mahasiswa secara setara. Alih-alih menjadikan pendidikan agama dengan semangat klaim kebenaran mutlak (*truth claim*), dosen bersangkutan malah menjadikannya sebagai sarana dialog, yakni mendialogkan perbedaan yang ada, dalam konteks ini agama tidak diperlakukan sebagai paradigma keagamaan tapi paradigma keilmuan, artinya agama sebenarnya dapat diperlakukan dan dipandang seperti halnya disiplin ilmu lain sehingga selalu terbuka untuk dikaji, dipelajari, dibedah bahkan dikritik.

Di sisi lain, dalam konteks relasi personel dan sosial di luar kampus sikap dan perlakuan

toleran baik pada pegawai maupun mahasiswa menjadi kekuatan. Adanya kesediaan menerima yang lain dan berbeda, sikap adil, demokratis dan *equal* adalah diantara nilai-nilai multikulturalisme. Interaksi personal dan sosial kerap kali lebih mampu mencegah kesalahpahaman dan prasangka terhadap pihak lain yang berbeda, penelitian ini menunjukkan bahwa relasi personel dan sosial yang setara di kalangan mahasiswa cukup efektif menumbuhkan sikap saling menghargai, selain itu tersedianya lembaga kemahasiswaan yang bersifat inklusif dan menerima perbedaan agama juga berpengaruh terhadap tumbuhnya nilai-nilai multikulturalisme tersebut. Dengan demikian pendidikan sebagai upaya melakukan rekayasa sosial sesungguhnya memiliki peran strategis baik untuk membangun integrasi maupun disintegrasi, pendidikan adalah instrumen paling efektif untuk mewujudkan kohesi dan harmoni sosial sekaligus diharmonikan di tengah masyarakat, ditakdirkan sebagai negara majemuk Indonesia menghadapi tantangan berat bagaimana mengelola berbagai keragaman dirinya (budaya, agama, adat-istiadat, bahasa, suku) agar menjadi kekuatan dan bukan sebagai kelemahan, tantangan tersebut bertambah kompleks karena berpapasan dengan globalisasi dengan segala konsekuensi yang menyertainya.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Meski tidak sekompleks di tempat lain, tapi kehadiran beberapa mahasiswa non muslim di kampus STKIP Yapis sudah mulai dirasakan sebagai tantangan, yakni bagaimana mengakomodasi kebutuhan kelompok minoritas baik dalam kebijakan kampus, praktik pembelajaran maupun relasi dan interaksi mereka di luar kelas. Terlebih lagi STKIP Yapis yang berada di bawah yayasan Islam, penelitian ini menunjukkan bahwa meski minoritas tapi beberapa mahasiswa nonmuslim yang menjadi subjek penelitian ini menilai bahwa penerapan nilai-nilai multikulturalisme yang berbasis pada pengakuan dan rasa saling menghargai perbedaan berjalan cukup baik, sehingga sebagai minoritas mereka merasa nyaman dan aman, hal itu terutama didukung dua hal. Pertama, pendekatan pembelajaran terutama oleh dosen (agama) yang akomodatif terhadap perbedaan doktrin agama mahasiswa minoritas dengan agama mayo-

ritas warga kampus. Kedua, lingkungan pergaulan sesama mahasiswa yang menerima secara terbuka kelompok minoritas maupun kesediaan organisasi ekstra kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menerima keanggotaan dari mahasiswa nonmuslim.

##### B. Saran

Adapun saran-saran dari penelitian ini adalah:

1. Impelementasi nilai-nilai multikulturalisme di kampus STKIP Yapis Dompu diharapkan terus diperluas, tidak hanya dalam konteks perbedaan agama tapi juga kelompok minoritas lainnya seperti mahasiswa difabel, perbedaan etnik dan dialek, gender dan lainnya.
2. Pola pembelajaran maupun interaksi yang mengakomodasi perbedaan agama tidak hanya dilakukan secara personal oleh dosen tertentu, tetapi menjadi komitmen semua tenaga pengajar.
3. Program keagamaan seperti kursus membaca Al-Quran (mengaji) sebaiknya tidak diberlakukan juga bagi mahasiswa non muslim. Kendati sebagai minoritas mereka tidak mempersoalkannya tapi bagaimanapun keharusan tersebut akan mengganggu suasana harmoni maupun nilai-nilai multikulturalisme yang sudah terbangun.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Mahfud, C. 2011. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muh Amin, "Pendidikan Multikultural", JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Volume 09, No. 1, Tahun 2018.
- Mulyana, D. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Naisbitt, J dan Aburdene. 1994. *Global Paradox*. Terjemahan Drs. Budijanto. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Nugraha, D., dkk, "Urgensi Pendidikan Multikultural di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume I Nomor 2 (November) 2020.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Tantowi, Y. 2017. "Mengobati Luka Tambora: Pengalaman Pemerintah dalam Membangun Pemerintahan Inklusif" dalam Ahmad Zainul Hamdi dan Marzuki Wahid. 2017. *Ruang Untuk Yang Kecil dan Berbeda: Pemerintahan Inklusif dan Perlindungan Minoritas*. Yogyakarta: Gading.
- Waston dan Aly. A. *Pendidikan Multikultural dalam Perguruan Tinggi Islam Sebuah Implementasi Konseptual Pemikiran James A. Banks*, Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA), Surakarta, Desember 2018.
- UNESCO. (1972). *Learning To Be*. Paris: UNESCO.